

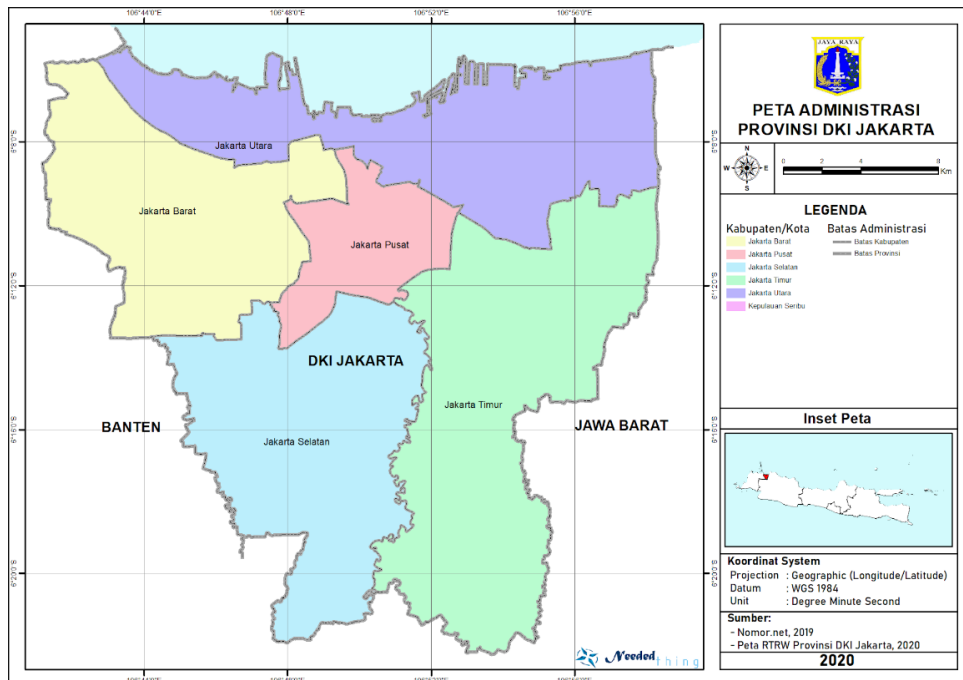
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Google.com

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak di antara $106^{\circ}41' 7''$ hingga $106^{\circ}58'23''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'15''$ hingga $6^{\circ}22'11''$ Lintang Selatan. Luas daratan dari Provinsi DKI Jakarta mencapai 661.52 km^2 dan lautan yang seluas $6.977,5 \text{ km}^2$ serta terdapat sekitar 110 pulau yang terdapat di Kepulauan Seribu. Dilihat secara administratif, di bagian Utara Provinsi DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan di bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok. Selanjutnya, di bagian sebelah Timur wilayah Provinsi DKI Jakarta tersebut

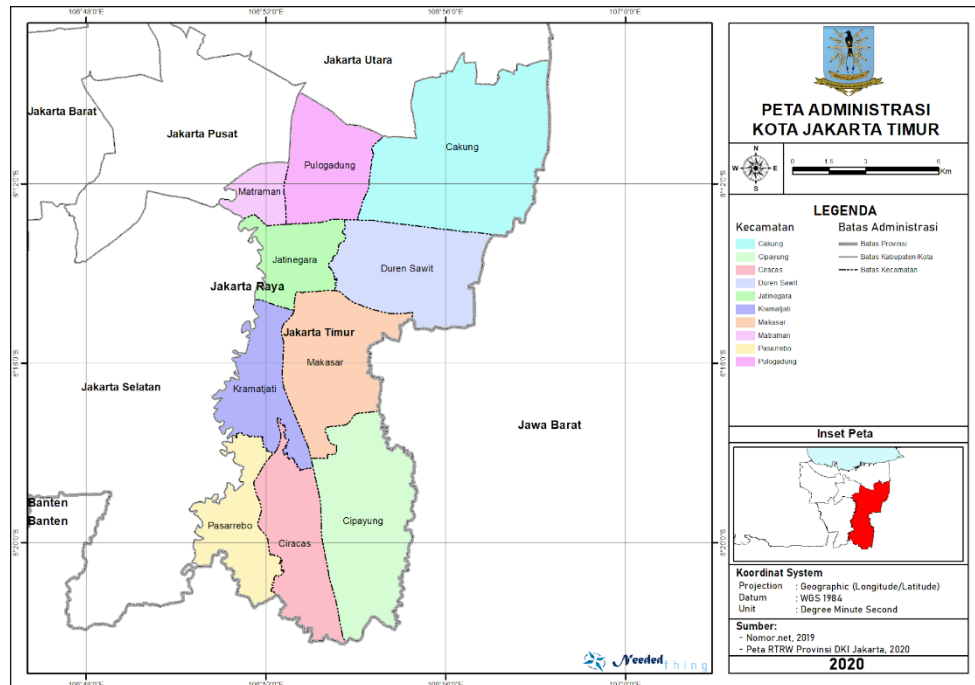
berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, sedangkan di bagian Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kabupaten dan Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

2.2. Gambaran Umum Kota Jakarta Timur

2.2.1 Kondisi Geografis Kota Jakarta Timur

Kota Jakarta Timur merupakan salah satu dari lima kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang terletak di wilayah Jakarta bagian Timur. Luas wilayah Kota Jakarta Timur mencapai 187,75 km² atau setara 28,37% total luas dari keseluruhan Provinsi DKI Jakarta. Dilihat secara geografis, posisi kota ini terletak antara 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan. Berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Utara di sebelah Utara, sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Bekasi, dan dengan Kabupaten Bogor di sebelah Selatan. Kota Jakarta Timur merupakan kota yang paling luas di antara kota-kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar dari wilayah Kota Jakarta Timur merupakan dataran rendah dan sisanya rawa, kali, serta persawahan.

Gambar 2.2
Peta Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber: Google.com

2.2.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Timur

Secara administrasi, pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur terbagi ke dalam 10 Kecamatan, yakni Kecamatan Ciracas, Cipayung, Makasar, Cakung, Matraman, Pulogadung, Pasar Rebo, Kramatjati, Jatinegara, dan Duren Sawit. Selanjutnya, wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dibagi atas 65 kelurahan, 673 rukun warga (RW) dan 7.513 rukun tetangga (RT). Berdasarkan data dari Sudin Kependudukan Jakarta Timur, total penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 2.868.910 jiwa per tahun 2016 dengan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.421.645 jiwa dan laki-laki mencapai 1.447.265 jiwa. Dengan hasil ini menempatkan Kota Jakarta Timur menjadi kota dengan penduduk terbanyak se-

Provinsi DKI Jakarta. Berikut jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur yang dipaparkan menurut jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Jakarta Timur menurut Jenis Kelamin (Jiwa),
Tahun 2014, 2015, dan 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Pasar Rebo	103.339	104.931	106.501	101.339	103.177	104.991	204.678	208.108	211.492
Ciracas	135.014	136.475	137.888	132.297	134.086	135.829	267.311	270.561	273.717
Cipayung	131.648	135.415	139.226	128.930	132.976	137.076	260.578	268.391	276.302
Makasar	98.158	99.017	99.837	97.520	98.637	99.715	195.678	197.654	199.552
Kramat Jati	143.577	144.735	145.834	142.535	144.068	145.540	286.112	288.803	291.374
Jatinegara	140.068	140.540	141.003	131.148	131.656	132.155	271.216	272.196	273.158
Duren Sawit	196.316	196.764	197.121	198.341	199.326	200.210	394.657	396.090	397.331
Cakung	269.764	271.206	272.534	253.395	255.438	257.363	523.159	526.644	529.897
Pulo Gadung	131.436	131.601	131.757	133.014	133.246	133.466	264.450	264.847	265.223
Matraman	75.245	75.407	75.564	74.910	75.108	75.300	150.155	150.515	150.864
Kota Jakarta Timur	1.424.565	1.436.091	1.447.265	1.393.429	1.407.718	1.421.645	2.817.994	2.843.809	2.868.910

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur

Melihat data Tabel 2.1, di setiap periode, tingkat pertumbuhan penduduk Kota Jakarta Timur selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari *website* resmi Statistik.jakarta.go.id, selang dua tahun kemudian, di tahun 2018 jumlah penduduk wilayah Kota Jakarta Timur mencapai angka 3.111.563 jiwa dengan penduduk laki-laki mencapai 1.568.451 jiwa dan perempuan sebanyak 1.543.112 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Jakarta Timur juga cukup tinggi, yakni sebanyak 16.550,04 jiwa/Km². Selain itu, di antara kota administrasi di Provinsi

DKI Jakarta lainnya, kota ini menjadi kota dengan jumlah tenaga kerja tertinggi sebesar 28,71%.

2.2.3 Potensi Ekonomi Kota Jakarta Timur

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur hampir mencapai 30% dari total ke seluruhan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menjadikan kota Jakarta Timur menjadi wilayah terluas dibandingkan kota administrasi Jakarta lainnya. Kelebihan ini coba dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dengan menciptakan sejumlah kawasan-kawasan potensial dan strategis bagi perkembangan pembangunan daerah. Kawasan tersebut terdiri dari berbagai kegiatan sektor strategis seperti sektor perdagangan, industri, permukiman, pariwisata, pertanian dan lainnya. Mayoritas dari kawasan potensial yang ada di Kota Jakarta Timur ialah pada sektor perdagangan, industri, dan kawasan sentra kegiatan ekonomi.

Kawasan-kawasan potensi seperti dipaparkan di Tabel 2.2 merupakan kawasan strategis Kota Jakarta Timur yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat sekitar, budaya, sosial, dan lingkungan. Kawasan tersebut sehari-hari dipadati oleh masyarakat berdomisili di Kota Jakarta Timur maupun luar kota, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli atau pengunjung. Dilihat dari Tabel 2.2, proyeksi potensi pada kawasan menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bertumpu pada kegiatan perdagangan. Dengan adanya kawasan berpotensi beserta kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya, kawasan tersebut berkembang membuka lapangan usaha bagi masyarakat dan membawa pengaruh positif pada tersedianya

lapangan pekerjaan sektor informal. Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam *website* resminya menyebutkan beberapa kawasan potensial di Kota Jakarta Timur, yaitu:

Tabel 2.2
Kawasan Potensial di Kawasan Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kawasan	Proyeksi Potensi
1.	Kawasan Jatinegara	a. Kawasan dengan potensi pusat kegiatan ekonomi pada aspek perdagangan.
2.	Kawasan Sentra Primer Timur (SPBT)	a. Diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Jakarta Timur serta menjadi pusat kegiatan pemerintahan, moda transportasi, pusat kegiatan bisnis.
3.	Kawasan Mebel Klender	a. Kawasan dengan pusat promosi mebel dan Pusat kegiatan ekonomi lokal.
4.	Kawasan PIK Pulo Gadung	a. Kawasan yang mayoritas pada aspek perdagangan sehingga mendukung pengembangan industri UMKM daerah. b. Menjadi kawasan hunian dengan intensitas/kepadatan tinggi dan bersifat hunian produktif, yaitu terutama untuk yang bekerja/terlibat pada kegiatan industri di kawasan ini.
5.	Kawasan Cililitan	a. Sebagai kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kota Jakarta Timur melalui aspek perdagangan. b. Terkenal dengan kawasan perbelanjaan Pusat Grosir Cililitan (PGC).
6.	RPHU Rawa Kepiting	a. Kawasan ini berfokus pada pelayanan terkait peternakan unggas.
7.	Banjir Kanal Timur (BKT)	a. Kanal ini diklaim mampu membantu mengurangi 13 lokasi rawan genangan dan melindungi sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur (207 km ²) dari limpasan 5 Kali sekitar Kota Jakarta.
8.	Terminal Pulo Gebang	a. Diproyeksikan menjadi terminal terbesar dan termodern di Jakarta.
9.	Hutan Kota	a. Kawasan ini berfungsi sebagai paru-paru bagi

		padatnya Kota Jakarta dan sekitarnya dan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota.
10.	Kawasan Pasar Prumpung	a. Di pasar ini menjual mainan anak-anak lengkap, aksesoris, pernik-pernik rambut yang lengkap dan murah yang sering disebut memiliki keunikan tersendiri dan menjadi salah satu tujuan wisata belanja di Kota Jakarta Timur.
11.	Kawasan Pasar Induk Kramat Jati	a. Pasar ini buka 24 jam sehari dan hampir dipastikan pasar ini selalu ramai pembeli sepanjang hari.

Sumber: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

2.3. Ketenagakerjaan

2.3.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta

Buah dari diadakannya Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia membawa dampak pada seluruh aspek yang melibatkan banyak publik, salah satunya pada aspek ketenagakerjaan. Menjadi pusat pemerintahan, pusat pembangunan, pusat perekonomian dan lainnya memunculkan daya tarik bagi para masyarakat dan pencari kerja dari beragam daerah untuk mencari nafkah dan menetap di Kota Jakarta. Hal ini menyebabkan berbagai efek buruk pada kota ini seperti permasalahan kepadatan penduduk, ketersediaan lapangan pekerjaan yang menipis, dan rendahnya mutu angkatan kerja di wilayah kota Jakarta akibat dari para pencari kerja yang urbanisasi ke kota ini tidak semuanya mengenyam dan menyelesaikan tahapan pendidikan formal. Alhasil, banyak dari para pekerja tersebut tidak berhasil mendapat pekerjaan dan bahkan tidak sedikit yang menjadi pengangguran.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta diperparah oleh datangnya pandemi Covid-19. Dengan penduduk usia kerja dan/atau angkatan kerja yang

terus meningkat, permintaan untuk lapangan pekerjaan juga sama halnya. Kebijakan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi secara masif seperti menutup perusahaan, gerai makanan, toko usaha justru mematikan pemasukan bagi para perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan tidak mampu membayar upah karyawan-karyawannya sehingga memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Berikut disajikan data publikasi dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2020 mengenai informasi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2020.

Tabel 2.3
Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2019-Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019		Agustus 2020	
	(orang)	(%)	(orang)	(%)
Penduduk Usia Kerja	8.126.124	100,00	8.199.694	100,00
Angkatan Kerja	5.192.351	63,90	5.232.031	63,81
a) Bekerja	4.852.949	93,46	4.659.251	89,05
b) Pengangguran	339.402	6,54	572.780	10,95
Bukan Angkatan Kerja	2.933.773	36,10	2.967.663	36,19
a) Sekolah	777.504	26,50	725.470	24,45
b) Mengurus Rumah Tangga	1.771.539	60,39	1.819.345	61,30
c) Lainnya	384.730	13,11	422.848	14,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		63,90		63,81
Tingkat Kesempatan Kerja		93,46		89,05
Tingkat Pengangguran Terbuka		6,54		10,95

Sumber: Sakernas Agustus 2019-2020, BPS Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.3 menunjukkan perbedaan-perbedaan, baik peningkatan maupun penurunan pada beberapa aspek antara kedua tahun tersebut. Aspek yang paling

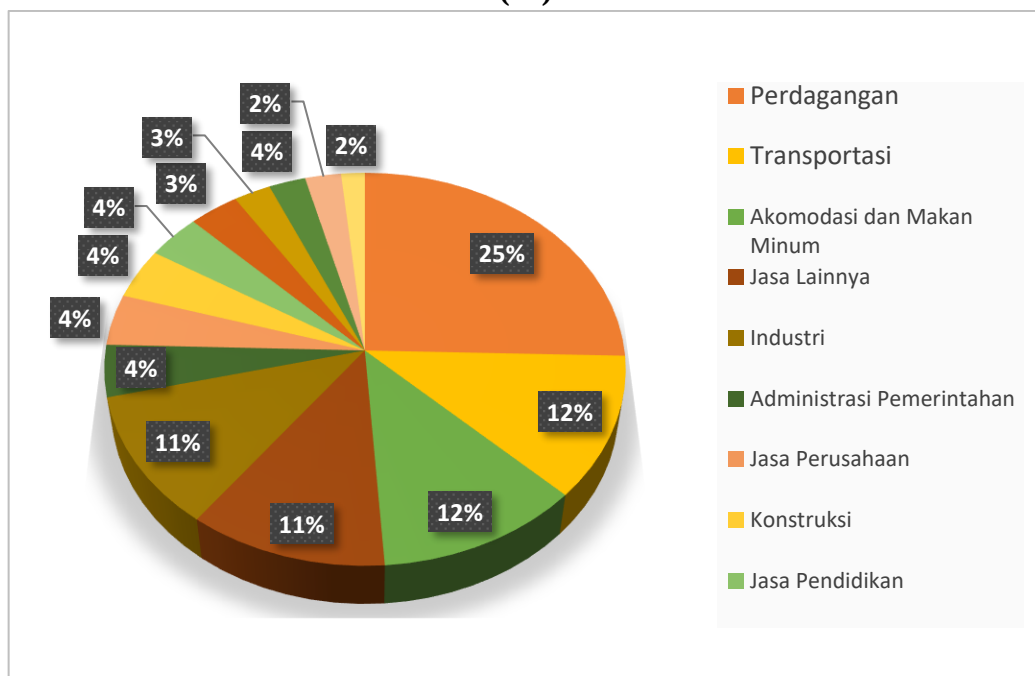
signifikan perbedaannya ialah pada angkatan kerja yang pengangguran. Efek dilanda pandemi mengakibatkan jumlah pengangguran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena banyak pekerja yang di PHK dan di rumahkan oleh perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja mengalami penurunan signifikan dari 93,46 persen pada Agustus 2019 menjadi 89,05 persen pada Agustus 2020. Hal ini menginterpretasikan bahwa penduduk yang bekerja lebih sedikit dari penduduk angkatan kerja pada Agustus 2020.

Selain karena Covid-19, menurunnya angka penduduk angkatan kerja yang bekerja juga dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Ketidaksesuaian antara kriteria pekerjaan yang dicari dengan kualitas pekerja itu sendiri sering menjadi alasan pekerja di Kota Jakarta sulit mendapat pekerjaan. Berlandaskan pada data dari BPS Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar penduduk bekerja di Kota Jakarta didominasi oleh pekerja pada sektor formal dengan lulusan SMA/SMK dan pekerja yang bekerja pada sektor informal mayoritas hanya lulusan SMP ke bawah. Artinya, secara kompetensi mayoritas penduduk bekerja Kota Jakarta masih sangat rendah untuk mampu bersaing. Mengingat Kota Jakarta adalah kota besar yang daerah asal penduduknya beragam, bahkan tidak sedikit pekerja asing yang bekerja di kota ini. Selain itu, kini Indonesia juga sedang memasuki era persaingan global sehingga pekerja seakan dituntut memiliki jiwa kompetitif untuk terus meningkatkan kualitas diri. Saat ini memang

peluang untuk bekerja menjadi berkurang karena efek pandemi, namun hal ini dapat mengimplikasikan bahwa pekerja yang bisa bekerja di kala pandemi merupakan orang-orang yang memang berkualitas, sesuai, serta siap secara kompetensi dan kemampuan dengan pasar tenaga kerja yang saat ini dibutuhkan.

2.3.2 Sektor Lapangan Pekerjaan Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Gambar 2.3
Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Jakarta, Agustus 2020 (%)



Sumber: Publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta berasal dari sektor perdagangan, sebanyak 1,18 juta orang (25,43%), disusul oleh sektor transportasi sebesar 11,76% dan sektor akomodasi dan makan minum sebesar 11,70%. Sektor-sektor lapangan pekerjaan pada Gambar 2.3 tidak luput dari serangan pandemi Covid-19. Tidak sedikit pekerja atau pengusaha yang

menghasilkan ekonomi dari sektor-sektor tersebut harus terseok-seok untuk bisa *survive* dari pandemi.

2.3.2.1 Sektor Lapangan Pekerjaan Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, di bawah ini merupakan 4 sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan pekerja yang diPHK.

Tabel 2.4
Sektor yang Paling Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pekerja yang di PHK

No.	Sektor	Persen (%)
1.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,8%
2.	Transportasi dan Pergudangan	11,7%
3.	Perdagangan Besar dan Eceran	8,7%
4.	Industri Pengolahan	4,5%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 2.4 sektor yang menempati urutan teratas, yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada sektor ini, salah satu yang termasuk di dalamnya ialah bidang perhotelan dan pariwisata. Disusul oleh sektor Transportasi dan Pergudangan salah satunya seperti perusahaan BUMN, yakni Transjakarta, maskapai penerbangan, kawasan industri dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada sektor Perdagangan Besar dan Eceran meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha, baik dari masyarakat kecil maupun pengusaha. Terakhir, dari sektor Industri Pengolahan contohnya industri penyedia tekstil dan furnitur.

2.3.3 Jumlah Pekerja

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, total keseluruhan pekerja di Ibukota DKI Jakarta ini mencapai 4.852.949 pekerja pada Agustus 2019 dan 4.659.251 pekerja pada Agustus 2020. Terjadi penurunan sebesar 193.698 pekerja dalam selang waktu satu tahun saja. Hal ini tentu imbas dari datangnya pandemi di mana terjadi pembatasan kegiatan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, termasuk untuk bekerja yang dapat memicu masyarakat menjadi pengangguran.

2.3.3.1 Jumlah Pekerja yang Terkena PHK dan Di rumahkan

Dampak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pekerja terpaksa diPHK maupun di rumahkan. Berikut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 terkait Laporan Pendataan Pekerja/Buruh Terdampak Covid-19 (Di rumahkan dan PHK), yang dibagi menjadi dua waktu tahap.

Tabel 2.5
Laporan Pendataan Pekerja/Buruh Terdampak Covid-19 (Di rumahkan dan PHK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

	Tahap I (April 2020)		Tahap II (Mei 2020)		Total	
	Perusahaan	Pekerja	Perusahaan	Pekerja	Perusahaan	Pekerja
Di rumahkan	16.198	172.222	16.684	100.111	32.882	272.333
PHK	3.361	30.363	3.421	20.528	6.782	50.891
Total	19.559	202.585	20.105	120.639	39.664	323.224

Sumber: Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta

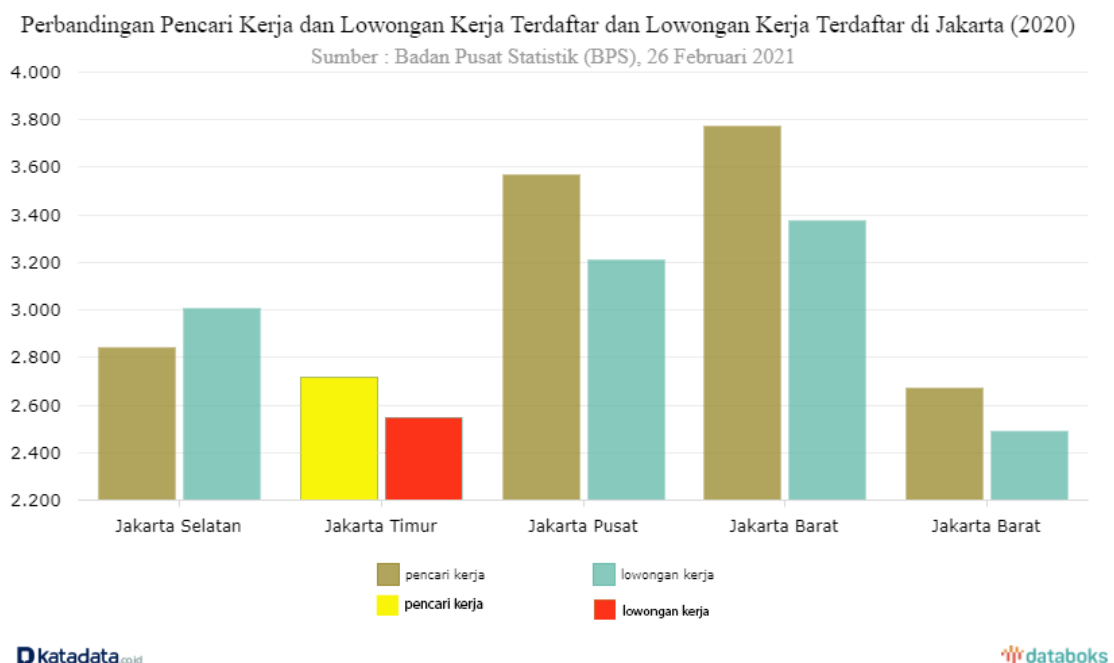
Perlu diketahui, data dari Tabel 2.5 merupakan data laporan pekerja/buruh serta perusahaan yang mencatatkan perselisihan di Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sehingga data ini hanya sebagai penggambaran kecil dari jumlah pekerja yang diPHK dan di rumahkan di Provinsi DKI Jakarta. Dilihat dari tabel Tabel 2.5, dampak dari pandemi Covid-19 dalam kurun waktu satu tahun mencatatkan sebanyak 323.224 pekerja yang diPHK dan di rumahkan. Selanjutnya dari perusahaan mencatatkan 39.664 pekerja yang diPHK dan di rumahkan. Besarnya angka tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai penanganan pandemi Covid-19 seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan perusahaan menutup tempat usahanya demi mengurangi penyebaran virus yang dapat ditularkan dari kerumunan orang. Dampak dari hal itu menyebabkan perusahaan tidak mendapat pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar gaji pekerja-pekerjanya dan pada akhirnya meningkatnya penduduk angkatan kerja yang pengangguran tidak dapat dihindarkan.

2.3.4 Kesempatan Kerja di Kota Jakarta Timur

Pengertian kesempatan kerja menurut Disnaker sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Mengingat keseluruhan penelitian membahas mengenai aspek ketenagakerjaan di Kota Jakarta Timur maka tingkat kesempatan kerja di Kota Jakarta Timur juga menjadi perhatian yang penting dan berhubungan dengan penelitian ini. Program Kartu Prakerja menyasar penduduk Angkatan Kerja

Indonesia yang mana *goals* dari program nantinya adalah menjadikan pekerja Indonesia mampu bersaing di dunia kerja dengan *skills* yang berkualitas sehingga diharapkan pengangguran pun akan perlahan berkurang. Namun, untuk mencapai *goals* tersebut diperlukan keseimbangan antara kualitas pekerja dan jumlah kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan yang ada. Berikut adalah infografis mengenai perbandingan lowongan pekerjaan dengan pencari kerja terdaftar yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020.

Gambar 2.4
Perbandingan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber: Katadata.com, 2021.

Jumlah ketersediaan lapangan kerja di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 14,6 ribu lowongan, sedangkan jumlah penduduk Angkatan Kerja yang sedang mencari kerja sebanyak 15,6 ribu dan ini baru hanya yang terdaftar oleh

sistem saja. Perbandingan antara pencari kerja dan lowongan kerja terdaftar di wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut data Gambar 2.4 menyatakan mayoritas jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan kerja, termasuk pada Kota Jakarta Timur. Hanya pada Kota Jakarta Selatan saja yang memiliki lowongan kerja lebih banyak dari pencari kerjanya. Ketidakseimbangan antara lowongan kerja dan permintaan kerja ini mempengaruhi pencari kerja yang berdomisili di Kota Jakarta Timur lebih memilih untuk melamar dan bekerja di luar Kota Jakarta Timur, mengingat kesempatan kerja terlihat lebih berpeluang jika di luar Kota Jakarta Timur dan fenomena ini dapat diwajarkan. Hal ini juga menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur belum mampu menyerap para pencari pekerja yang selain daripada itu, dipengaruhi juga oleh potensi ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor informal, sedangkan peserta dari program Kartu Prakerja mayoritas mengincar pekerjaan pada sektor formal.

2.4. Gambaran Umum Program Kartu Prakerja

2.4.1 Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja diinisiasi oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 silam. Tujuan diterbitkannya program ini untuk meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saing angkatan kerja Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan semangat kewirausahaan. Program ini diharapkan menjadi solusi yang sejalan dengan permasalahan ketenagakerjaan Indonesia saat ini.

Hadirnya pandemi Covid-19 mengubah haluan program ini menjadi semi-bantuan sosial atau termasuk dalam salah satu program perlindungan sosial.

Dalam Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tahun 2020, untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional, program Kartu Prakerja mempunyai peran di dalamnya. Keputusan ini menyebabkan anggaran dana yang dicananangkan untuk program bertambah dua kali lipat menjadi Rp20 triliun pada tahun 2020 dan total mencapai Rp41 triliun pada tahun 2021. Dibuktikan dengan keputusan pemerintah untuk menambahkan nominal insentif dan menambahkan kuota peserta dari program ini. Sesuai rencana awal, program ini hanya mencakup sebanyak 2 juta pekerja Indonesia kemudian kuota dinaikkan menjadi 5,5 juta pekerja. Harapannya, insentif tersebut dapat dipergunakan peserta untuk membeli keperluan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan pokok sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Dengan tambahan kuota peserta diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terbantu pada masa pandemi berkat program ini.

Berdasarkan Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tahun 2020, besaran total bantuan yang didapatkan oleh peserta program Kartu Prakerja sebesar Rp3,55 juta, dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Bantuan Pelatihan sebesar Rp1 juta. Bantuan ini berupa dana elektronik yang ditujukan untuk membeli pelatihan *online* yang diinginkan, di platform yang sudah disediakan. Bantuan Pelatihan ini sifatnya tidak dapat diuangkan.
2. Insentif Pasca Pelatihan sebesar Rp600 ribu, diberikan setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut, total menjadi Rp2,4 juta. Insentif ini diberikan hanya apabila peserta sudah menyelesaikan pelatihan.

3. Insentif Pasca Survei sebesar Rp50 ribu diberikan sebanyak 3 kali pengisian survei dalam kurun waktu 30 hari, 90 hari, dan 180 hari dari jangka waktu penerimaan insentif pertama, total menjadi Rp150 ribu.

Insentif diberikan melalui dompet digital atau melalui transfer ke rekening bank yang telah bekerjasama dengan program Kartu Prakerja, seperti Bank BNI, Gopay, Ovo, LinkAja, dan Dana.

2.4.2 Kolaborasi Program Kartu Prakerja dengan Mitra Swasta

Program Kartu Prakerja memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menembus babak baru industri 4.0. Oleh sebab itu, peran pemerintah sendiri saja tidak cukup. Demi mensukseskan program ini, pemerintah juga melaksanakan *Collaborative Governance* bersama dengan pihak swasta. Kerjasama dengan berbagai mitra swasta dipaparkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Kerjasama yang Dilakukan dengan Mitra Usaha Swasta

	Mitra Pembayar an	Lembaga Penyedia Pelatihan	Platform Digital	Institusi Pendidikan	Job Portal
Mitra Swasta	a) Bank BNI b) Gopay c) Dana d) LinkAja e) Ovo	a) Skill Academy b) Kariermu c) Baking World d) Kelas.com, dan e) 179 lembaga lainnya.	a) Pijar b) Tokopedia c) Pintaria d) Bukalapak e) Mau Belajar Apa f) Sekolah Ilmu	a) Universitas Indonesia b) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya c) Institut Pertanian Bogor d) Indonesia Mengajar	a) Jobs.id b) JobStreet. com c) Karir.

Sumber: Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 2020

Menyesuaikan anjuran *social distancing* di kala pandemi, keseluruhan proses dari pendaftaran, pelatihan sampai pasca pelatihan program Kartu Prakerja dilaksanakan secara daring. Namun, apabila terdapat kendala bagi masyarakat yang kesulitan mengakses atau berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), masyarakat dapat mengurus pendaftaran secara luring dengan meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja setempat. Didorong oleh kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan program Kartu Prakerja dapat mencakup semua angkatan kerja se-Indonesia, dari beragam kota, daerah, bahkan desa. Total 5,5 juta warga yang lolos menjadi peserta per tahun 2020 dan tersebar di 514 Kabupaten.

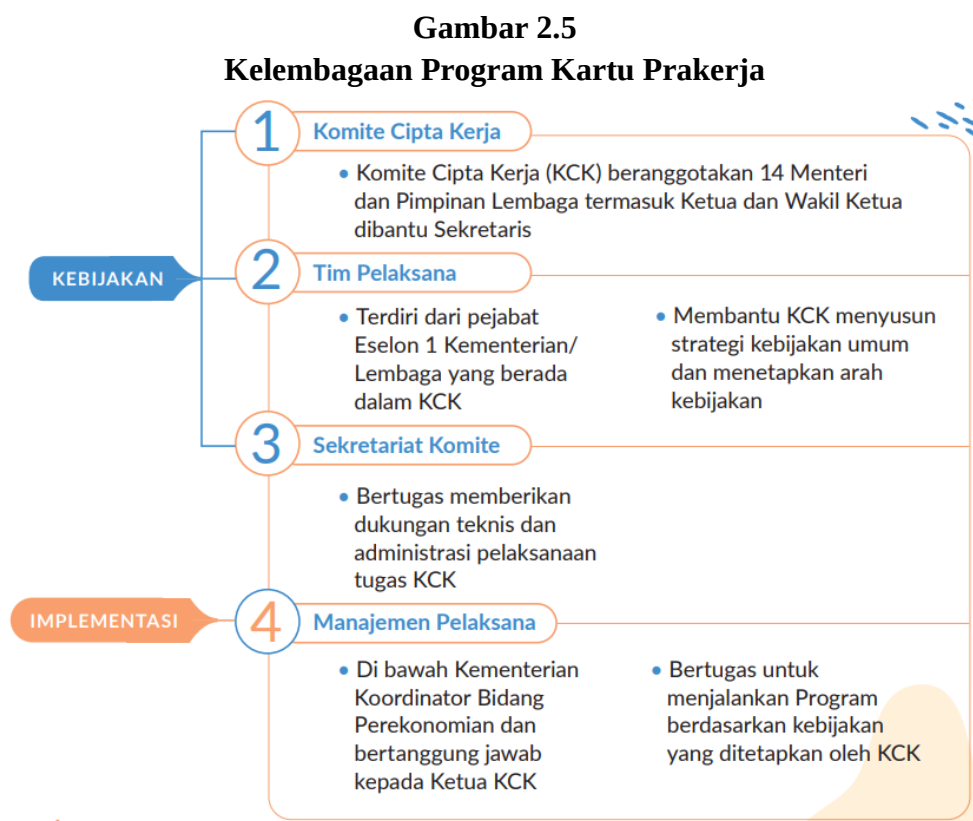
2.4.3 Syarat Penerima Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua masyarakat Indonesia, namun dengan catatan tertentu, yaitu:

- a. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Minimal berusia 18 tahun.
- c. Bukan seorang pelajar aktif atau mahasiswa aktif.
- d. Pencari kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
- e. Pekerja/Buruh yang terkena PHK dan di rumahkan.
- f. Pelaku UMKM.
- g. Tidak diperbolehkan untuk Pejabat Negara, ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN/BUMD.

- h. Tidak diperbolehkan bagi masyarakat penerima bantuan sosial Kemensos dan BSU Kemnaker/BP Jamsostek.
- i. Terkhusus untuk masyarakat terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan sosial selama pandemi (Kemenko Perekonomian, 2020).

2.4.4 Struktur Organisasi Program Kartu Prakerja

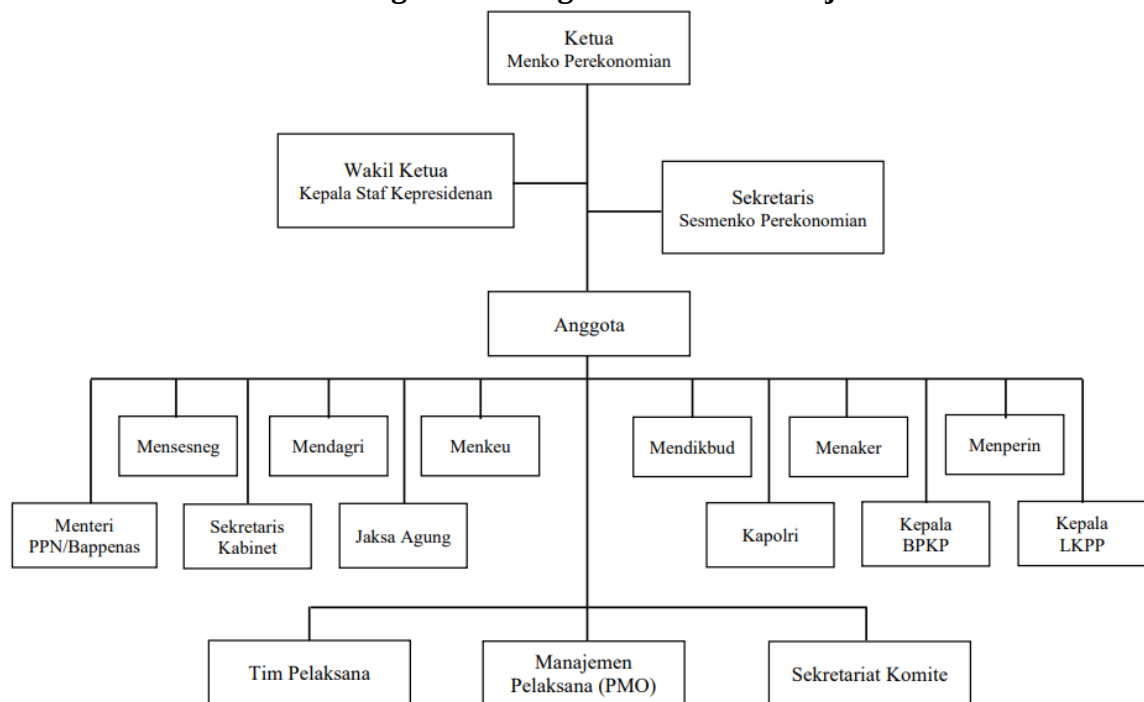


Sumber: Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan program yang didesain untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang saat ini Indonesia sedang alami. Untuk mampu mewujudkan keberhasilan tujuan program, penyelesaian dari sisi ketenagakerjaan saja belum cukup. Isi dari program Kartu Prakerja perlu melibatkan banyak aspek karena pada dasarnya permasalahan ketenagakerjaan juga menyangkut aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi dan pendidikan.

Berikut struktur organisasi program Kartu Prakerja yang diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Gambar 2.6
Struktur Organisasi Program Kartu Prakerja



Sumber: Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

2.4.5 Kebijakan Hukum yang Mendasari Program Kartu Prakerja

Program ini didasari regulasi yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kebutuhan dari program Kartu Prakerja. Diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Kemudian selama keberjalanannya, program Kartu Prakerja terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan perubahan di

lapangan. Sebagai contoh, perubahan Program Kartu Prakerja menjadi salah satu bagian dari *Social Safety Net* karena pandemi Covid-19 sehingga untuk memperkuat payung hukum, regulasi yang ada coba disempurnakan menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diturunkan ke Permenko Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tujuan Program Kartu Prakerja, yaitu untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Untuk dapat menjadi peserta dari program Kartu Prakerja, beberapa hal harus diperhatikan. Program ini diperuntukkan semua Warga Negara Indonesia dengan minimal usia 18 tahun, yang belum berkerja, sedang bekerja, atau ingin mengganti pekerjaan dengan catatan tidak diperbolehkan untuk pelajar atau mahasiswa terdaftar aktif. Khususnya untuk para pencari kerja dan buruh yang terkena PHK maupun yang di rumahkan karena Covid-19 dan yang belum menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah selama pandemi ini. Program ini juga terbuka untuk para pelaku usaha mikro kecil (UMKM) yang terdampak Covid-19.

2.4.6 Pelatihan yang Disediakan Program Kartu Prakerja

Sistematika pelatihan dalam program Kartu Prakerja dilakukan sepenuhnya secara *online* dengan menggandeng lembaga swasta atau *startup-startup* tanah air.

Per tahun 2021, lembaga penyedia pelatihan yang tersedia dalam program Kartu Prakerja ada 214 lembaga dengan tiap lembaga penyedia pelatihan menyediakan berbagai kategori pelatihan. Dari total keseluruhan lembaga pelatihan tersebut, terdapat tujuh lembaga penyedia pelatihan yang paling diminati oleh para peserta.

Gambar 2. 7
7 Lembaga Pelatihan yang Paling Banyak Dibeli di Program Kartu Prakerja

	1. Skill Academy
	2. Baking World
	3. Kelas.com
	4. PT Yureka Edukasi Cipta
	5. Luarsekolah
	6. Global Edukasi Talenta Inkubator (GETI)
	7. Badr Interactive/Founder+

Sumber: Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020

Dari ketujuh lembaga pelatihan pada Gambar 2.7, PMO program Kartu Prakerja merangkum pelatihan-pelatihan dengan pemilihan terbanyak berdasarkan kategori-kategorinya. Kategori tersebut antara lain:

- a. Penjualan dan Pemasaran. Pada kategori ini, pelatihan yang paling diminati ialah Strategi Penjualan dan Pemasaran Digital (*Digital Marketing*). Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin maju, banyak perusahaan mulai mencari pekerja-pekerja yang menguasai bidang pemasaran

online. Selain itu, keterampilan dari pelatihan ini juga dapat digunakan peserta untuk memulai berwirausaha.

- b. Gaya Hidup. Cukup banyak peserta program yang berminat pada kategori pelatihan ini namun pelatihan Membuat Masker dan Teknik Tata Rias menjadi yang paling diminati. Diketahui bahwa program Kartu Prakerja bertujuan untuk memantik ekonomi masyarakat melalui kegiatan berwirausaha mandiri. Pelatihan Membuat Masker dirasa sesuai dengan kebutuhan pasar di kala pandemi dan keterampilan Tata Rias juga banyak dibutuhkan, baik untuk berwirausaha maupun untuk keperluan pribadi.
- c. Bahasa Asing. Terdapat berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti Bahasa Korea, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, Bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi. Kursus Bahasa Inggris menempati posisi teratas yang paling banyak dipilih peserta.
- d. Makanan dan Minuman. Dalam kategori pelatihan ini, cukup beragam pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan. Tiga pelatihan teratas di antaranya adalah Teknik Memasak, Membuat Kue, dan Barista.
- e. Manajemen. Pelatihan tentang Bisnis Rumahan atau membuka Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) juga cukup banyak diminati oleh peserta program. Efek dari pandemi memang begitu hebat dirasakan, terutama terhadap perekonomian masyarakat. Pemilihan pelatihan ini dirasa menjadi pilihan rasional karena dengan membuka bisnis/UMKM dapat menjadi alternatif masyarakat untuk menambah pemasukan saat pandemi.

- f. Keuangan. Peserta dari program Kartu Prakerja juga meminati kategori ini, dan pelatihan Perencanaan Keuangan dan Kursus Akuntansi Dasar menjadi pelatihan teratas yang dipilih oleh banyak peserta.
- g. Sosial dan Perilaku. Pelatihan-pelatihan pada kategori ini juga disediakan oleh Lembaga pelatihan dengan beragam jenis dan perspektif. Dua pelatihan yang paling banyak diikuti peserta ialah pelatihan Komunikasi dan Sukses Wawancara Kerja. Contoh jenis pelatihan dari Komunikasi, yakni Sukses Kerja dengan Komunikasi Efektif dari Lembaga Pelatihan HarukaEdu dan Dasar-Dasar Komunikasi di Dunia Perhotelan dan Pariwisata dari Pintaria.
- h. Teknologi Informasi. Pengaruh dari zaman digital saat ini mempengaruhi peserta program untuk mengikuti pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (IT). Pelatihan-pelatihan yang juga paling banyak dipilih ialah Komputer Dasar, AutoCAD, dan sebagainya. *Skills* yang bisa diperoleh dari pelatihan ini salah satunya ialah pembuatan web informasi.

2.4.7 Sebaran Penerima Program Kartu Prakerja di DKI Jakarta

Program Kartu Prakerja dibuka pertama kali pada April 2020 silam. Program ini didesain secara *full online* dan proses penerimaan pesertanya dibagi secara berkala dalam bentuk per gelombang atau *batch*. Dalam dua tahun pelaksanaannya, program Kartu Prakerja telah membuka sebanyak 22 *batch* dan menjaring lebih dari 11,4 juta orang. Peserta-peserta yang mengikuti program ini berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, warga DKI Jakarta yang menjadi penerima

program Kartu Prakerja dari *batch* 1-11 sebanyak 542.507 warga. Selanjutnya, pada *batch* ke 12-17, totalnya mencapai 288.431 sehingga total keseluruhan dari *batch* 1-17 berkisar 830.938 penerima. Banyaknya jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti program ini, menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi nomor dua teratas dengan kategori penerima program Kartu Prakerja terbanyak.

2.4.7.1 Penerima Program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur

Tabel 2.7
Sebaran Penerima Program Kartu Prakerja di DKI Jakarta (Batch 1-17)

No.	Kota di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Penerima
1.	Kota Administrasi Jakarta Utara	115.143 Penerima
2.	Kota Administrasi Jakarta Barat	206.408 Penerima
3.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	82.059 Penerima
4.	Kota Administrasi Jakarta Timur	240.950 Penerima
5.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	185.570 Penerima
6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	808 Penerima
Total		830.938 Penerima

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Menurut Tabel 2.7, total penerima program Kartu Prakerja di Kota Jakarta Timur jumlahnya 240.950 penerima dari total *batch* 1-17, sedangkan pada tahun 2020, dengan dibukanya *batch* 1-11 penerima dari Provinsi DKI Jakarta mencapai 285.000 orang dan penerima yang berasal dari Kota Jakarta Timur menempati urutan yang paling banyak, dengan jumlah penerima sebesar 29% dari total penerima. Dari total penerima tersebut, 5 di antaranya adalah informan pada penelitian ini. Dengan jumlah penerima sebanyak itu, menempatkan Kota Jakarta

Timur menjadi kota dengan penerima terbanyak di antara kota-kota Jakarta lainnya.